

TAJUK RENCANA

THR, Problema dan Budaya Perusahaan

POSKO Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) berhasil menuntaskan seluruh pengaduan yang diterima. Sebagaimana diketahui tahun lalu terdapat 40 aduan yang diterima. Sebanyak 39 aduan sudah bisa diselesaikan, sedang satu perusahaan baru menuntaskan 50%. Tahun lalu ungkap Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinsosnakertrans Kota Yogya Rihari Wulandari, THR bisa dicicil sampai Desember 2020. "Tapi untuk tahun ini harus dibayar penuh". (KR, 3/5)

Peristiwa harian ini menjadi petunjuk bahwa THR selalu menjadi problema. Bahkan penuntasan aduan masalah THR pun tidak semudah harapan. Prosesnya bisa lama bahkan hingga lebaran telah usai. Tak heran, bila memasuki Ramadan, persoalan THR selalu mencuat bahkan *trending topic* media.

THR merupakan hak pekerja yang diberikan pengusaha atau pemberi kerja. Masuk dalam kategori non-upah yang sifat pembayarannya adalah wajib. Dibayarkan satu sekali saat hari raya keagamaan. Bisa juga sesuai aturan perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Sebagaimana diatur Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/ Buruh di Perusahaan.

Disebutkan Ayunita Nur (KR, 10/4), THR merupakan hak bagi pekerja, baik yang hubungan kerjanya terikat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Permenaker tersebut bahkan menyebutkan jika pemberi kerja pengusaha terlambat membayar THR, akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 5% dari besaran THR yang seharusnya diberikan pada pekerja.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bila THR untuk

pekerja sudah ada SE Menaker No M/6/HK.04/IV/2021, dibayar secara penuh dan paling lama dibayar H-7 sebelum lebaran. Sedang pemerintah membayar THR pada PNS, TNI dan Polri pada H-10 lebaran. Kalau Hari Raya jatuh pertengahan Mei, mestinya THR cair awal Mei (KR, 20/4).

Hanya saja tidak bisa diingkari, pandemi yang sudah lebih dari setahun telah memperburuk bukan hanya perekonomian negeri, namun juga secara global. Kondisi ini sedikit banyak juga berdampak pada perusahaan dalam negeri. Tidak sedikit perusahaan harus melepas pekerja dengan memberi pesangon. Selain tetap harus rutin membayarkan upah setiap bulan, kini memikirkan THR juga. Realita yang benar-benar tidak mudah bagi perusahaan.

Realita lain adalah pengeluaran rata-rata rumah tangga pada masa Ramadan justru meningkat, karena harga kebutuhan bahan pokok cenderung merangkak naik. Terlebih saat mendekati Hari H Idul Fitri. Sekalipun mudik dilarang, tidak mungkin rumah tangga di Indonesia tidak membuat sesuatu di rumah pada Hari Raya. Karena Idul Fitri adalah kemenangan, ungkapan syukur dan kebahagiaan setelah sebulan berpuasa.

Pandemi bisa menjadi salah satu variabel mengapa hak buruh bisa tidak dipenuhi. Namun kesadaran akan pentingnya hak-hak pekerja mestinya sudah menjadi budaya perusahaan. Maka hubungan dialogis antara perusahaan dengan pekerja, buruh termasuk serikat pekerja perlu dibangun dengan baik. Sementara pemerintah menjadi regulator dan pengawas yang objektif. Hakikatnya, hubungan industrial yang harmonis akan terwujud manakala ada relasi yang terbentuk di antara ketiganya. Sebab ketiganya berada dalam hubungan *symbiosis mutualistis*, meski tidak setara. □

Menjaga Stabilitas Stok dan Harga Sembako

Jusuf Irianto

VOLUME kesibukan pemerintah bertambah besar dalam memberi layanan terbaik kepada masyarakat terlebih di bulan Ramadan. Salah satunya adalah upaya memastikan stabilitas pasokan dan harga sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako). Di tengah kondisi pandemi yang menghambat arus barang dan jasa kebutuhan masyarakat termasuk sembako, muncul kekhawatiran stok sembako menipis. Sementara terjadi lonjakan permintaan khususnya menjelang hari raya.

Sebetulnya masyarakat tak perlu khawatir. Pemerintah, melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag), telah memberi garansi stok sembako selama bulan Ramadan hingga menjelang Idul Fitri. Artinya, pemerintah menjamin keseimbangan *supply* dan *demand* kebutuhan masyarakat, dengan pelbagai cara.

Namun demikian, masyarakat tetap mengkhawatirkan kenaikan harga. Sebagaimana terjadi sebelumnya, dalam setiap perayaan hari besar keagamaan harga-harga cenderung naik.



KR-JOKO SANTOSO

Berbagai Strategi

Menanggapi keluhan tersebut, pemerintah telah merumuskan berbagai strategi dan upaya stabilisasi harga sekaligus memastikan ketersediaan pasokan sesuai permintaan. Salah satu upayanya dengan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) stok dan harga barang pokok di seluruh wilayah Indonesia secara *real time*.

Selain itu, Kemendag juga berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan (Disdag) di setiap provinsi, lembaga atau kementerian terkait, pelaku usaha dan asosiasi pengusaha dalam rangka mengamankan stok barang. Disdag provinsi didukung Disdag kabupaten/kota diminta setiap saat melakukan monev terhadap distribusi sembako hingga ke tingkat eceran serta ke pihak penyalur/distributor di setiap wilayah. Monev tersebut melibatkan Satugas Tugas (Satgas) Pangan seperti dilakukan tahun sebelumnya.

Ditengarai ada unsur spekulasi dalam setiap gejolak harga dan kelangkaan stok sembako. Untuk itu, pemerintah berupa-

Produk Hortikultura (RIPH) sebagaimana dilakukan pada tahun 2020 lalu yang terbukti sukses.

Meskipun menimbulkan polemik, pelepasan RIPH sebagai persyaratan impor produk hortikultura ternyata sangat bermanfaat. RIPH merupakan terobosan mengatasi panjangnya rantai birokrasi khususnya di Kemendag maupun kementerian lain terkait. Dengan RIPH, tahap penerbitan dokumen terbukti lebih cepat dan transparan. Pun, produk yang diimpor dapat segera menyalur ke pasar lokal secara tepat waktu sehingga masyarakat diuntungkan.

RIPH dapat dimaknai sebagai kebijakan pemerintah dalam menjaga stabil-

tas harga lebih efektif. Tentunya implementasi kebijakan tersebut harus didukung semua pihak berkepentingan berdasar pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih efisien dan efektif.

Kelancaran distribusi

Tak hanya pada level kebijakan, pemenuhan kebutuhan sembako juga mengarah pada masalah teknis yakni kelancaran distribusi. Jaminan keamanan dalam ketersediaan kebutuhan harus diikuti pula dengan mekanisme arus transportasi yang mampu menjangkau semua lapisan masyarakat di segenap penjuru tanah air.

Untuk itu, pemerintah diharapkan mampu menjawab tantangan distribusi seefektif mungkin. Pada 2020 lalu misalnya, Kemendag menjalin kerjasama dengan salah satu penyedia transportasi online. Pelibatan pihak ketiga dalam distribusi merupakan bukti komitmen pemerintah memberi layanan terbaik yang perlu terus dikembangkan.

Upaya kreatif pemerintah dalam distribusi tersebut patut diacungi jempol dalam rangka menjaga keamanan dan kelancaran ketersediaan sembako. Masyarakat diuntungkan dengan jaminan distribusi yang lancar.

Mari kita dukung upaya pemerintah dalam menjaga stok serta stabilisasi harga sembako. Agar masyarakat dapat beribadah selama bulan Ramadan dengan lebih khusus sekaligus berbhagia merayakan Idul Fitri yang segera akan datang. □

** Prof Dr Jusuf Irianto, Guru Besar Administrasi Publik FISIP Universitas Airlangga*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkannya foto copy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
@ pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Mati Gaya di Era Pandemi

PANDEMI Covid-19 sudah berlangsung satu tahun dan kita belum tahu kapan akan berakhir. Yang jelas, pandemi tidak akan berakhir dengan cepat karena saat ini jangkauan penularan wabah Covid-19 masih tinggi. Tentu kita tidak akan berpangku tangan dengan keadaan ini. Meski awalnya kita sempat mati gaya, mau berbuat apa, maka sekarang kita harus segera *move on*, menyesuaikan dengan situasi yang ada.

Apapun profesi kita, mesti melakukan penyesuaian agar bisa tetap eksis. Tidak dipungkiri, banyak di antara kita yang mati gaya, tidak tahu harus melakukan apa untuk mengatasi keterbatasan ini. Berbagai perusahaan, badan usaha, termasuk lembaga pendidikan dipaksa harus menata ulang dalam memberikan bentuk pelayanan agar tetap bisa bertahan. Tidak sedikit di antara mereka yang akhirnya mati gaya dan harus menutup usahanya.

Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mengatasi mati gaya ini adalah membangun kesadaran pribadi tentang keadaan kita hari ini. Pandemi telah memaksa masyarakat untuk menggeser kebiasaan dan budayanya. Pandemi semakin menyadarkan kita bahwa saat ini kita telah memasuki era digital. Berbagai hal bisa kita peroleh secara digital. Smartphone adalah barang wajib yang mesti dimiliki oleh

setiap warga negara.

Langkah kedua yang bisa kita lakukan adalah menjadi pembelajar yang cepat. Kita harus memaksa diri kita untuk belajar dan mencoba hal-hal yang baru melalui smartphone yang kita miliki. Contoh yang paling mudah adalah transaksi keuangan. Saat ini bukan zamannya kita membayar atau mengirim uang lewat ATM, karena sudah ada layanan transaksi online dari berbagai bank. Tidak hanya itu, saat ini tersedia banyak jasa transfer antarbank yang gratis. Apabila hal seperti ini belum kita kuasai, maka urusan keuangan kita masih akan ribet dan memakan waktu yang lebih lama.

Langkah ketiga adalah memulai mewujudkan ide yang sudah ada, meskipun belum utuh. Kita harus memiliki keberanian untuk memulai langkah pertama. Sebab, dengan memulai langkah yang pertama, kita akan terus belajar selama proses mewujudkan ide. Tentu akan ada masalah yang muncul dalam proses itu. Dengan masalah itulah, kita akan didorong untuk terus berpikir mengatasinya dalam rangka menyempurnakan ide. Pada akhirnya, kita akan memiliki gaya baru di era pandemi ini yang membuat kita bisa eksis bahkan bisa berkembang dengan pesat. □

Adib Nur Aziz SSI, Guru MTsN 4 Sleman.

Perlu Ada Restorasi Pendidikan

Cahyono Agus

PERINGATAN Hari Pendidikan Nasional masih diwarnai dengan indeks kualitas yang rendah. Berbagai lembaga internasional masih menempatkan Indonesia pada urutan buncit. *The Global Knowledge Index* (GKI) yang dikeluarkan UNDP 2020, menempatkan Indonesia pada nomor 81 dari 138 negara. Sebagai negara dengan kinerja moderat terkait infrastruktur ilmu pengetahuan, namun masih di bawah rerata internasional.

Sejak GKI pertama kali diluncurkan 2017, ranking Indonesia di kalangan ASEAN-6 berada paling bawah. Indonesia dinilai cukup dalam sektor ekonomi dan teknologi informasi & komunikasi. Namun masih rendah dalam lingkungan pendidikan umum; pendidikan pra-universitas; pendidikan & pelatihan teknis & kejuruan; pendidikan tinggi; dan terutama dalam hal penelitian, pengembangan & inovasi. Indonesia harus segera mengejar ketertinggalan yang cukup jauh agar dapat mewujudkan masyarakat dan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan. Sebagaimana yang disampaikan KI Hadjar Dewantara: *lawan sastra ngesti mulya*, dengan ilmu pengetahuan menuju kemuliaan.

Terobosan

Siswa didik terlalu banyak dan berat sejak dini. Tidak sesuai, bahkan melebihi kodrat alam dan dirinya. Namun, kemampuan numerik dan literasi masih sangat rendah, meskipun angka nilai ujian siswa cenderung semakin sempurna. Pada masa pandemi Covid-19, kehilangan proses pembelajaran telah terjadi akibat pelaksanaan sekolah daring, tatap layar. Pemerintah mentolerir dengan tidak perlu menuntaskan capaian pembelajaran, sedangkan sistem jaminan mutu cenderung lebih bersifat administratif. Menuntut nilai semakin bagus, meski kadang tanpa kompetensi.

Kemendikbud RI membuat terobosan

out of the box within the system dengan menyusun peta jalan pendidikan Indonesia 2020-2035 untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui program Merdeka Belajar. Kebijakan ini relatif modern, sistematis, terstruktur, berbasis kondisi saat ini dan berbasis futuristik. Namun dinilai menghilangkan jejak langkah, jati diri bangsa, nilai historis.

Gubernur DIY mencetuskan renaisans Yogyakarta untuk mewujudkan peradaban baru unggul yang menghasilkan *jalma kang utama*. Yang berasaskan rasa ketuhanan, rasa kemanusiaan, dan rasa keadilan, dengan mengadalkan modal dasar kebudayaan dan pendidikan. Budaya harus mampu sebagai arus utama dan cukup lampah pembangunan masyarakat terpadu yang menyejahterakan seluruh makluk hidup.

Perlu revolusi total untuk mewujudkan pendidikan karakteristik unggulan khas Yogyakarta Istimewa berbasis kebudayaan unggulan leluhur yang bermartabat dan berkelanjutan. Dengan program berbasis kinerja, yang terpadu, menyeluruh, tidak egosentris, dan bermanfaat nyata. Disamping kesiapan konsep besar, perbaikan *mind set*, penyamaan persepsi, orientasi program, bukan orientasi proyek.

Keselarasn Hidup

Budaya istimewa berupa keselarasn hidup, sikap/perilaku luhur diharapkan mampu membentuk karakter: jati diri, harga diri, percaya diri, mandiri. Agar mempunyai daya tahan, daya tangkal, daya kembang, bercirikan 9W (*wareg, waras, uwasanaa, wisma, wasis, washita, wibawa, waluya, wicaksana*). Eksistensi, revitalisasi, internalisasi dan ekspresi pengembang-

an kebudayaan leluhur unggulan lokal ini akan sangat memperkaya dan mampu membentuk karakter luhur bangsa.

Peraturan dan perundang-undangan sektor pendidikan masih belum mendukung upaya untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Isu kontroversial tentang Pancasila dan agama pada peraturan kebijakan pendidikan yang terakhir ini semakin menunjukkan perlunya perundangan, kebijakan, kepemimpinan, implementasi, komitmen dan partisipasi yang kuat dari seluruh insan pendidikan. Restorasi sistem pendidikan nasional melalui omnibus law mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi sangat urgen. Pendidikan nasional harus mampu membentuk manusia utama sebagai generasi unggul Indonesia Emas. □

** Ki Prof Dr Cahyono Agus, Ketua Umum Perkumpulan Keluarga Besar Tamansiswa (PKBTS), Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM*

Pojok KR

Nama pengorder 'sate beracun' mulai terkuak
-- **Kupas tuntas kejahatan terencana** ***
Penyelenggara negara tak boleh terima hadiah THR
-- **Lebih bermanfaat bagi yatim piatu dan fakir miskin** ***
Menurut Presiden, pendidikan harus memerdekakan manusia
-- **Kurikulumnya juga harus membuat bahagia**

Beraksi

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurija Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percektakan:** Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab peretakan **Alamat Homepage:** http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan: H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP. **Banyumas:** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro: Driyanto.
Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro: Sri Warsiti. **Magelang:** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro: Drs M Thoha. **Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd Kepala Biro: Asrul Sani. **Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.